



## Pendampingan Penyusunan Rencana Bisnis Koperasi Desa Kelurahan (KDKMP) Merah Putih sebagai Pilar Ekonomi Kerakyatan di Kota Denpasar

### *Assistance in the Preparation of a Business Plan for the Merah Putih Village/Subdistrict Cooperative (KDKMP) as a Pillar of the People's Economy in Denpasar City*

**Ketut Witara**

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Mahardhika Surabaya Indonesia

\*Penulis Korespondensi: [ketutwitara@gmail.com](mailto:ketutwitara@gmail.com)

---

#### **Riwayat Artikel:**

Naskah Masuk: 21 Januari 2026;

Revisi: 20 Februari 2026;

Diterima: 21 Maret 2026;

Terbit: 31 Maret 2026;

**Keywords:** *Business Assistant; Business Plan; Economic Empowerment; Financing; Merah Putih Cooperative.*

**Abstract.** *This community service initiative is designed to accelerate the establishment and strengthening of Merah Putih Village/Sub-district Cooperatives (KDKMP) through mentoring activities carried out by Business Assistants (BA). The program was conducted in Denpasar City, Bali, from October 2025 to May 2026, and was implemented in two phases: October–December 2025 (Phase 1) and March–May 2026 (Phase 2). The approach involved intensive mentoring, capacity-building training, facilitation in developing business plans, as well as support in fulfilling legal requirements and improving access to financing. The findings reveal that the involvement of Business Assistants has a positive impact on enhancing the managerial capabilities of cooperative administrators, improving the quality of business plans to become more feasible and bankable, and strengthening the cooperatives' readiness to engage with financial institutions. Nevertheless, several challenges persist, including limited human resource capacity, suboptimal utilization of the cooperative information system (SIMKOPDES), and insufficient coordination among stakeholders. To address these issues, several strategic measures have been undertaken, such as continuous capacity development programs, strengthening the role of Business Assistants, expanding access to financial resources, and fostering stronger collaboration among stakeholders. Through a more integrated approach, this program is expected to support the development of KDKMP into independent, competitive, and sustainable cooperatives that contribute to community-based economic growth.*

---

#### **Abstrak.**

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dirancang untuk mempercepat proses pembentukan sekaligus penguatan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) melalui pendampingan yang dilakukan oleh *Business Assistant* (BA). Pelaksanaan kegiatan berlangsung di Kota Denpasar, Bali, selama periode Oktober 2025 sampai dengan Mei 2026, yang dibagi ke dalam dua fase, yaitu Oktober–Desember 2025 (Tahap 1) dan Maret–Mei 2026 (Tahap 2). Pendekatan yang digunakan mencakup pembinaan secara intensif, penyelenggaraan pelatihan, fasilitasi penyusunan rencana usaha, serta dukungan dalam pengurusan aspek legal dan akses terhadap sumber pembiayaan. Temuan dari kegiatan ini menunjukkan bahwa keberadaan *Business Assistant* memberikan dampak positif terhadap peningkatan kemampuan manajerial pengelola koperasi, mendorong penyusunan rencana usaha yang lebih layak secara bisnis dan memenuhi kriteria pembiayaan (bankable), serta memperkuat kesiapan koperasi dalam menjalin akses dengan lembaga keuangan. Di sisi lain, masih dijumpai sejumlah kendala, antara lain keterbatasan kualitas sumber daya manusia, belum maksimalnya pemanfaatan sistem informasi koperasi (SIMKOPDES), serta koordinasi antar pihak terkait yang belum berjalan optimal. Berbagai langkah strategis telah dilakukan untuk mengatasi tantangan tersebut, di antaranya peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui program pelatihan berkelanjutan, penguatan fungsi dan peran *Business Assistant*, perluasan akses terhadap sumber pendanaan, serta peningkatan sinergi antar pemangku kepentingan. Dengan penerapan strategi yang terpadu, program ini diharapkan mampu mendorong KDKMP berkembang menjadi koperasi yang mandiri, memiliki daya saing, dan berkelanjutan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi berbasis komunitas.

**Kata kunci:** Asisten Bisnis; Koperasi Merah Putih; Pemberdayaan Ekonomi; Pembiayaan; Rencana Bisnis.

## 1. PENDAHULUAN

Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 mengenai percepatan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih merupakan langkah strategis pemerintah dalam memperkuat ekonomi berbasis masyarakat melalui pengembangan koperasi di tingkat desa dan kelurahan. Program ini menargetkan pembentukan serta penguatan 80.000 koperasi yang berfungsi sebagai pusat aktivitas ekonomi masyarakat, meliputi penyediaan kebutuhan dasar, layanan kesehatan sederhana, akses pembiayaan, serta dukungan logistik yang memanfaatkan potensi lokal.

Secara konseptual, koperasi merupakan fondasi utama dalam sistem ekonomi kerakyatan yang mengedepankan nilai kekeluargaan dan semangat gotong royong. Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dijelaskan bahwa koperasi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota secara khusus dan masyarakat secara luas (Republik Indonesia, 1992). Pandangan ini sejalan dengan pemikiran Mohammad Hatta yang menegaskan bahwa koperasi merupakan bentuk usaha kolektif yang didasarkan pada prinsip saling membantu untuk memperbaiki kondisi ekonomi bersama (Hatta, 1954). Dari sudut pandang ekonomi pembangunan, koperasi memiliki kontribusi penting dalam memperkuat struktur ekonomi lokal sekaligus mengurangi kesenjangan. *International Labour Organization* menyatakan bahwa koperasi berperan dalam penciptaan lapangan kerja, peningkatan inklusi sosial, serta mendorong pembangunan ekonomi lokal yang berkelanjutan (*International Labour Organization* [ILO], 2015). Selain itu, penelitian lain menunjukkan bahwa koperasi mampu meningkatkan ketahanan ekonomi masyarakat lokal melalui penguatan kelembagaan ekonomi berbasis komunitas (Birchall, 2004). Meskipun demikian, pelaksanaan program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) masih menghadapi berbagai kendala, terutama terkait keterbatasan kapasitas sumber daya manusia dalam aspek manajemen dan perencanaan usaha. Banyak koperasi belum mampu menyusun rencana bisnis yang memenuhi kriteria kelayakan usaha maupun kelayakan pembiayaan. World Bank (2020) menegaskan bahwa akses terhadap pembiayaan bagi usaha kecil dan berbasis komunitas sangat dipengaruhi oleh kualitas perencanaan bisnis dan kelengkapan dokumen keuangan. Di samping itu, keterbatasan akses terhadap sumber pembiayaan menjadi tantangan signifikan dalam pengembangan koperasi. Tanpa didukung rencana bisnis yang matang, komprehensif, dan realistis, koperasi akan sulit memperoleh kepercayaan dari lembaga keuangan. Studi oleh OECD (2018) juga menekankan bahwa akses pembiayaan merupakan faktor kunci dalam

meningkatkan daya saing usaha kecil dan koperasi di tingkat lokal. Oleh karena itu, penyusunan rencana bisnis yang berkualitas menjadi elemen penting dalam menjamin keberlanjutan usaha koperasi. Sebagai upaya mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah menghadirkan peran Asisten Bisnis (*Business Assistant/BA*) sebagai pendamping profesional bagi koperasi. Peran ini mencakup pendampingan dalam penyusunan rencana bisnis, peningkatan kapasitas manajerial, serta fasilitasi akses terhadap pembiayaan. Dalam perspektif manajemen strategis, pendampingan yang dilakukan secara intensif terbukti mampu meningkatkan efektivitas implementasi strategi organisasi serta kinerja usaha secara signifikan (David, 2011).

Dengan demikian, pendampingan dalam penyusunan rencana bisnis bagi Koperasi Desa Merah Putih menjadi aspek yang sangat krusial untuk memastikan keberlangsungan dan perkembangan koperasi. Melalui pendekatan yang sistematis dan kolaboratif, koperasi diharapkan dapat tumbuh menjadi entitas usaha yang mandiri, profesional, dan kompetitif, serta berperan sebagai pilar utama dalam penguatan ekonomi kerakyatan.

## **2. METODE**

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berfokus pada pendampingan penyusunan rencana bisnis Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) oleh *Business Assistant* (BA) dilakukan menggunakan pendekatan partisipatif (*participatory approach*), yang menitikberatkan pada keterlibatan aktif pengurus koperasi dalam setiap tahapan proses. Pendekatan partisipatif merupakan metode yang menempatkan masyarakat sebagai subjek utama dalam proses pembangunan, sehingga mampu meningkatkan rasa memiliki (*sense of ownership*) serta keberlanjutan program (Chambers, 1994). Selain itu, pendekatan ini juga dinilai efektif dalam menghasilkan solusi yang kontekstual karena didasarkan pada kebutuhan dan pengalaman langsung para pelaku di lapangan (Cornwall, 2008). Pendekatan ini dipilih agar hasil pendampingan tidak hanya bersifat konseptual, tetapi juga dapat diterapkan secara praktis sesuai dengan kondisi nyata di lapangan. Dalam konteks pemberdayaan masyarakat, partisipasi aktif terbukti mampu meningkatkan kapasitas individu maupun kelembagaan melalui proses pembelajaran bersama (*collective learning*) (Pretty, 1995).

Dalam pelaksanaannya, setiap BA KDKMP bertanggung jawab mendampingi sekitar 8 (delapan) hingga 12 (dua belas) koperasi dalam satu wilayah kabupaten/kota. Penetapan jumlah koperasi yang didampingi disesuaikan dengan jumlah KDKMP yang telah terbentuk di wilayah tersebut, dengan tetap mempertimbangkan aspek pemerataan tugas, efektivitas kerja, serta

efisiensi pelaksanaan, dan mengacu pada kebijakan yang ditetapkan oleh Kementerian Koperasi.

Kegiatan ini dilaksanakan oleh penulis di Kota Denpasar, Bali, pada periode Oktober – Desember 2025 (tahap 1) dan Maret - Mei 2026 (Tahap 2). Saat artikel ini di buat, kegiatan masih berlangsung dengan sasaran pengurus dan anggota koperasi binaan. Adapun peserta kegiatan berasal dari beberapa Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, yaitu:

Koperasi Kelurahan Merah Putih Dangin Puri

Koperasi Desa Merah Putih Dangin Puri Kangin

- a. Koperasi Desa Merah Putih Dangin Puri Kauh
- b. Koperasi Desa Merah Putih Dangin Puri Kaja
- c. Koperasi Kelurahan Merah Putih Pemecutan
- d. Koperasi Desa Merah Putih Pemecutan Kaja
- e. Koperasi Desa Merah Putih Tegal Kertha
- f. Koperasi Desa Merah Putih Tegal Harum
- g. Koperasi Kelurahan Merah Putih Padangsembian
- h. Koperasi Desa Merah Putih Sumerta Kaja
- i. Koperasi Desa Merah Putih Dauh Puri Kangin

Pendampingan dilakukan oleh *Business Assistant* (BA) KDKMP secara terstruktur, dengan mengacu pada mekanisme kerja, sistem pelaporan, serta target dan indikator kinerja yang telah ditetapkan.

### **Tahap Persiapan dan Koordinasi**

Tahap awal bertujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan dan membangun kesepahaman antara BA KDKMP dengan pengurus koperasi serta stakeholder terkait. Pada tahap ini, BA melakukan koordinasi dengan Dinas Koperasi Provinsi dan Kabupaten/Kota sesuai wilayah penempatan. Kegiatan yang dilakukan meliputi pengumpulan data awal berupa profil koperasi, struktur organisasi, kondisi usaha, serta dokumen pendukung lainnya. Selain itu, dilakukan observasi lapangan untuk memahami kondisi riil operasional koperasi, serta pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD) guna mengidentifikasi permasalahan dan potensi usaha. Dalam tahap ini juga disusun rencana kerja dan timeline kegiatan asistensi bulanan.

Secara administratif, BA KDKMP menandatangani kontrak kerja dan melengkapi dokumen persyaratan seperti KTP, NPWP, nomor rekening, ijazah, SKCK, dan surat pernyataan, yang kemudian diunggah ke dalam sistem SIMKOPDES sebagai bagian dari sistem pengelolaan data dan pelaporan.



**Gambar 1.** Koordinasi dengan Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kota Denpasar  
**Tahap Pelaksanaan (Pelatihan dan Lokakarya)**

Tahap pelaksanaan merupakan proses transfer pengetahuan kepada mitra melalui pelatihan dan lokakarya oleh Kementerian Koperasi dan Dinas Koperasi Kota Denpasar. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kapasitas pengurus koperasi dalam pengelolaan usaha. Kegiatan yang dilakukan meliputi sosialisasi pentingnya rencana bisnis, pelatihan manajemen koperasi dan kewirausahaan, serta lokakarya penyusunan rencana bisnis yang mencakup aspek pemasaran, operasional, sumber daya manusia, dan keuangan. Selain itu, dilakukan analisis untuk mengidentifikasi potensi ekonomi lokal sebagai dasar pengembangan unit usaha koperasi. Dalam tahap ini, BA KDKMP juga mulai memanfaatkan sistem SIMKOPDES untuk mendukung pencatatan data dan pelaporan kegiatan secara terstruktur.

#### **Tahap Pendampingan Intensif (*Mentoring*)**

Tahap pendampingan merupakan inti dari kegiatan, yang dilakukan secara intensif baik secara luring (*offline*) maupun daring (*online*). BA KDKMP diwajibkan melakukan kunjungan lapangan minimal dua kali dalam satu bulan ke setiap koperasi binaannya. Kegiatan pendampingan meliputi penyusunan draft rencana bisnis oleh pengurus koperasi, pendampingan teknis dalam penyusunan aspek kelayakan usaha (*feasibility*) dan kelayakan pembiayaan (*bankability*), serta pelaksanaan konsultasi untuk mengatasi kendala teknis yang dihadapi. Selain itu, BA melakukan verifikasi terhadap gerai koperasi yang dinyatakan aktif dengan memastikan kesesuaian kondisi di lapangan.

Seluruh aktivitas pendampingan dicatat melalui presensi harian pada sistem SIMKOPDES yang dilengkapi dengan foto swafoto dan data geolokasi. Hasil kegiatan asistensi juga diinput secara berkala (harian) ke dalam sistem sebagai bagian dari monitoring kinerja secara real-time.



**Gambar 2.** Pelaksanaan Musyawarah Desa Khusus KDMP Merah Putih

### **Tahap Evaluasi dan Monitoring**

Tahap evaluasi dilakukan untuk mengukur keberhasilan kegiatan pendampingan dan memastikan keberlanjutan program. Evaluasi dilakukan melalui perbandingan kondisi sebelum dan sesudah pendampingan, serta penilaian terhadap kualitas rencana bisnis yang dihasilkan. Monitoring juga dilakukan terhadap implementasi rencana bisnis dalam operasional koperasi. BA KDKMP menyusun laporan kinerja secara berkala (bulanan) kepada Dinas Koperasi Kabupaten/Kota dengan tembusan kepada pihak terkait. Pada akhir bulan, dilakukan konsolidasi minimal lima laporan kegiatan beserta bukti kehadiran dalam bentuk dokumen cetak (*hard file*) yang disampaikan kepada Dinas Koperasi. Laporan tersebut menjadi dasar dalam proses evaluasi dan pencairan honorarium BA KDKMP.



**Gambar 3.** Koordinasi dengan Kepala Desa dan Pengurus Koperasi

### Target dan Indikator Kinerja Pendampingan

Pelaksanaan pendampingan BA KDKMP diarahkan untuk mencapai target kinerja yang terukur, yaitu tersedianya data koperasi yang lengkap dan mutakhir dalam sistem SIMKOPDES, tersusunnya rencana bisnis dan strategi implementasi yang komprehensif, serta terpenuhinya kelengkapan administrasi dan legalitas usaha koperasi. Selain itu, diharapkan tersusun proposal bisnis yang memenuhi kriteria kelayakan usaha (*feasibility*) dan kelayakan pembiayaan (*bankability*), dilengkapi dengan model bisnis, proyeksi keuangan, dan rencana operasional yang realistis. Pendampingan juga ditujukan untuk memastikan koperasi siap dalam proses pengajuan pembiayaan kepada lembaga keuangan serta tersedianya laporan operasional koperasi dan laporan kinerja BA secara tepat waktu.

Indikator keberhasilan kegiatan meliputi ketersediaan data koperasi dalam SIMKOPDES, kelengkapan dokumen rencana bisnis, kesiapan dokumen administrasi untuk pengajuan pembiayaan, serta keberhasilan pendampingan dalam proses pengajuan dan perbaikan proposal bisnis sesuai standar lembaga keuangan.

### 3. HASIL

Pelaksanaan kegiatan pendampingan penyusunan rencana bisnis pada Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Kota Denpasar menunjukkan hasil yang signifikan dalam peningkatan kapasitas manajerial pengurus koperasi serta kesiapan koperasi dalam mengembangkan usaha secara berkelanjutan.

#### Peningkatan Kapasitas Manajerial Koperasi



**Gambar 4.** Tahapan Pelaksanaan Pendampingan

Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman pengurus koperasi terhadap konsep manajemen usaha dan pentingnya perencanaan bisnis. Melalui pelatihan dan lokakarya, pengurus koperasi mampu:

- a. Memahami struktur dan komponen rencana bisnis secara komprehensif;
- b. Mengidentifikasi potensi usaha berbasis sumber daya lokal;

Peningkatan kapasitas ini terlihat dari kemampuan pengurus dalam menyusun draft rencana bisnis secara mandiri dengan pendampingan terbatas.



**Gambar 5.** Pengecekan Operasional Klinik Koperasi Merah Putih Desa Tegal Harum  
**Penyusunan Rencana Bisnis (*Business Plan*)**

Seluruh koperasi binaan berhasil menyusun dokumen rencana bisnis yang mencakup aspek pemasaran, operasional, sumber daya manusia, dan keuangan. Dokumen tersebut telah disusun dengan pendekatan yang lebih sistematis dan realistis, serta mengacu pada prinsip kelayakan usaha (*feasibility*) dan kelayakan pembiayaan (*bankability*).

Beberapa koperasi telah mampu:

- a. Menyusun proyeksi keuangan sederhana;
- b. Menentukan model bisnis yang sesuai dengan potensi wilayah;
- c. Mengidentifikasi kebutuhan modal dan strategi pengembangan usaha.

**Peningkatan Kesiapan Akses Pembiayaan**

Melalui pendampingan intensif, koperasi menunjukkan peningkatan kesiapan dalam mengakses pembiayaan. Hal ini ditunjukkan dengan:

- a. Tersusunnya proposal bisnis yang lebih terstruktur dan sesuai standar lembaga keuangan;
- b. Mulainya proses pengajuan pembiayaan oleh beberapa koperasi ke lembaga perbankan;
- c. Peningkatan pemahaman terkait persyaratan administratif dan legalitas usaha.

Meskipun demikian, masih terdapat beberapa koperasi yang memerlukan penyempurnaan dokumen administratif sebelum dapat mengajukan pembiayaan secara optimal.

### **Optimalisasi Pemanfaatan SIMKOPDES**

Pemanfaatan Sistem Informasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (SIMKOPDES) dalam kegiatan pendampingan menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan. BA KDKMP secara aktif melakukan:

- a. Input data koperasi dan hasil kegiatan pendampingan secara berkala;
- b. Presensi harian berbasis geolokasi;
- c. Pelaporan kinerja secara terstruktur dan real-time.

Hal ini berdampak pada meningkatnya akurasi data serta kemudahan dalam monitoring dan evaluasi kegiatan.



**Gambar 6.** Aplikasi SIMKOPDES

### **Intensitas Pendampingan dan Monitoring**

Pendampingan dilakukan secara rutin dengan kunjungan lapangan minimal dua kali dalam satu bulan untuk setiap koperasi. Selain itu, dilakukan juga pendampingan secara daring melalui coaching clinic. Intensitas pendampingan ini memberikan dampak positif terhadap:

- a. Percepatan penyusunan rencana bisnis;
- b. Penyelesaian kendala teknis yang dihadapi pengurus;
- c. Peningkatan motivasi dan komitmen pengurus koperasi.

### **Evaluasi Capaian Kegiatan**

Secara umum, capaian kegiatan pendampingan dapat dirangkum sebagai berikut:

- a. Seluruh koperasi binaan telah melengkapi dokumen pendirian Koperasi (Akte Notaris) dan Nomor Induk Berusaha (NIB) serta memiliki draft proposal bisnis;
- b. Sebagian koperasi telah siap mengajukan kemitraan ke Bulog dan Pertamina Perta Gas;
- c. Terjadi peningkatan kapasitas SDM dalam pengelolaan usaha (pembuatan laporan dan

- transaksi pada gerai sembako);
- d. Sistem pelaporan dan monitoring berbasis SIMKOPDES berjalan dengan baik.

Namun demikian, masih terdapat beberapa kendala yang perlu ditindaklanjuti, seperti keterbatasan pemahaman keuangan lanjutan, kelengkapan legalitas usaha, serta perbedaan tingkat kesiapan antar koperasi.

#### 4. DISKUSI

Dalam pelaksanaan percepatan pembentukan dan pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), terdapat berbagai tantangan yang perlu diantisipasi secara sistematis. Permasalahan utama yang dihadapi antara lain keterbatasan kapasitas sumber daya manusia (SDM) pengurus koperasi, khususnya dalam aspek manajerial, penyusunan rencana bisnis, serta pengelolaan keuangan yang profesional. Hal ini berdampak pada kualitas rencana bisnis yang belum sepenuhnya memenuhi prinsip kelayakan usaha (*feasibility*) dan kelayakan pembiayaan (*bankability*). Ketidaklengkapan dokumen perizinan usaha juga menjadi hambatan dalam proses pengajuan pembiayaan kepada lembaga keuangan. Di sisi lain, keterbatasan jumlah tenaga pendamping di lapangan menyebabkan proses asistensi belum optimal dan belum merata di seluruh wilayah.

Permasalahan lainnya adalah belum optimalnya pemanfaatan Sistem Informasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (SIMKOPDES), baik dalam pencatatan data, pelaporan, maupun monitoring kinerja koperasi. Selain itu, koordinasi antar pemangku kepentingan, baik antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun lembaga keuangan, masih perlu diperkuat agar implementasi program dapat berjalan secara efektif dan terintegrasi.

Untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut, diperlukan langkah-langkah strategis yang terintegrasi. Peningkatan kapasitas SDM koperasi dilakukan melalui pelatihan, bimbingan teknis, dan pendampingan intensif oleh BA KDKMP. Dalam hal penyusunan rencana bisnis, BA KDKMP berperan aktif memastikan dokumen yang dihasilkan bersifat komprehensif, realistis, dan memenuhi standar kelayakan usaha serta pembiayaan.

Selanjutnya, fasilitasi akses pembiayaan dilakukan melalui pendampingan penyusunan proposal bisnis yang bankable serta penguatan komunikasi dengan lembaga keuangan. Standarisasi dan pendampingan dalam pemenuhan dokumen legalitas usaha juga menjadi prioritas untuk memastikan kesiapan koperasi dalam proses pengajuan pembiayaan.

Optimalisasi peran BA KDKMP dilakukan melalui pengaturan beban kerja yang proporsional serta penguatan sistem monitoring dan evaluasi. Pemanfaatan SIMKOPDES juga ditingkatkan sebagai alat utama dalam pengelolaan data dan pelaporan secara real-time.

Terakhir, penguatan koordinasi dan sinergi antar pemangku kepentingan dilakukan melalui forum komunikasi dan integrasi kebijakan, sehingga program KDKMP dapat berjalan secara efektif, efisien, dan berkelanjutan.

**Tabel 1.** Matriks Permasalahan dan Solusi

No	Permasalahan	Dampak	Solusi	Penanggung Jawab	Waktu
1	Keterbatasan kapasitas SDM koperasi	Pengelolaan koperasi tidak optimal	Pelatihan dan pendampingan oleh BA KDKMP	BA KDKMP, Dinas Koperasi	Ber kelanjutan
2	Rencana bisnis belum memenuhi standar	Sulit mendapatkan pembiayaan	Penyusunan business plan yang komprehensif dan bankable	BA KDKMP	1–3 bulan
3	Akses pembiayaan terbatas	Koperasi tidak dapat berkembang	Fasilitasi pengajuan pembiayaan dan linkage ke lembaga keuangan	BA KDKMP, Bank	3–6 bulan
4	Dokumen perizinan tidak lengkap	Pengajuan pembiayaan ditolak/tertunda	Pendampingan pemenuhan legalitas usaha	BA KDKMP, Dinas terkait	1–2 bulan
5	Pendampingan belum merata	Kinerja koperasi tidak seragam	Optimalisasi distribusi BA dan monitoring kinerja	Kementerian Koperasi, Dinas	Ber kelanjutan
6	Pemanfaatan SIMKOPDES belum optimal	Data tidak akurat dan tidak real-time	Pelatihan penggunaan sistem dan monitoring rutin	BA KDKMP, Dinas	Ber kelanjutan
7	Koordinasi antar stakeholder lemah	Program tidak terintegrasi	Penguatan forum koordinasi dan sinergi kebijakan	Pemerintah Pusat & Daerah	Berkala

Sumber : diolah penulis



**Gambar 6.** Launching Gerai Usaha Gas LPG 3 KG di KDMP Desa Tegal Kertha

## **5. KESIMPULAN**

Program percepatan pembentukan dan pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) merupakan langkah strategis pemerintah dalam memperkuat ekonomi kerakyatan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, serta mendorong pemerataan pembangunan. Keberadaan KDKMP diharapkan tidak hanya sebagai entitas administratif, tetapi juga sebagai lembaga usaha yang mampu memberikan manfaat nyata melalui penyediaan layanan ekonomi dan sosial bagi masyarakat. Dalam implementasinya, keberhasilan program ini sangat ditentukan oleh kualitas perencanaan usaha, kesiapan administrasi dan legalitas, serta akses terhadap sumber pembiayaan. Peran Asisten Bisnis (BA KDKMP) menjadi sangat penting dalam memberikan pendampingan intensif, mulai dari penyusunan rencana bisnis, pemenuhan persyaratan administrasi, hingga fasilitasi akses pembiayaan. Meskipun terdapat berbagai tantangan, seperti keterbatasan kapasitas SDM, kendala akses pembiayaan, serta belum optimalnya koordinasi dan pemanfaatan sistem informasi, langkah-langkah strategis yang terintegrasi dan berkelanjutan diyakini mampu mengatasi permasalahan tersebut.

Dengan dukungan seluruh pemangku kepentingan, KDKMP berpotensi tumbuh menjadi koperasi yang sehat, mandiri, dan berdaya saing. Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan pendampingan serta temuan di lapangan, diperlukan berbagai upaya strategis untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan dan keberlanjutan Koperasi Desa Merah Putih, antara lain melalui penguatan kapasitas SDM melalui pelatihan dan pendampingan berkelanjutan agar pengurus memiliki kompetensi dalam pengelolaan usaha, keuangan, dan manajemen koperasi secara profesional, optimalisasi peran BA KDKMP melalui dukungan sistem monitoring dan evaluasi yang terukur agar pendampingan lebih efektif dan tepat sasaran, peningkatan akses pembiayaan yang inklusif dan fleksibel disertai pendampingan penyusunan proposal usaha yang bankable, percepatan pemenuhan legalitas usaha melalui simplifikasi proses perizinan agar koperasi segera beroperasi dan memperoleh akses pembiayaan, optimalisasi pemanfaatan SIMKOPDES untuk mendukung transparansi, akuntabilitas, dan pengambilan keputusan berbasis data, penguatan koordinasi dan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga keuangan, dan koperasi agar implementasi program berjalan optimal, serta dukungan sarana dan prasarana dari pemerintah desa dan kelurahan secara *ex officio* berupa penyediaan ruang operasional, gudang, dan gerai sembako guna menunjang kelancaran operasional koperasi.

## DAFTAR REFERENSI

- Birchall, J. (2004). *Cooperatives and the millennium development goals*. International Labour Organization.
- Chambers, R. (1994). Participatory rural appraisal (PRA): Analysis of experience. *World Development*, 22(9), 1253–1268. [https://doi.org/10.1016/0305-750X\(94\)90003-5](https://doi.org/10.1016/0305-750X(94)90003-5)
- Cornwall, A. (2008). Unpacking “participation”: Models, meanings and practices. *Community Development Journal*, 43(3), 269–283. <https://doi.org/10.1093/cdj/bsn010>
- David, F. R. (2011). *Strategic management: Concepts and cases* (13th ed.). Pearson Education.
- Hatta, M. (1954). *Membangun koperasi dan koperasi membangun*. Kementerian Penerangan Republik Indonesia.
- Hisrich, R. D., Peters, M. P., & Shepherd, D. A. (2017). *Entrepreneurship* (10th ed.). McGraw-Hill Education.
- International Labour Organization. (2015). *Cooperatives and the sustainable development goals: A contribution to the post-2015 development debate*. ILO.
- Kotler, P., & Keller, K. L. (2016). *Marketing management* (15th ed.). Pearson Education.
- OECD. (2018). *Enhancing SME access to diversified financing instruments*. OECD Publishing.
- Republik Indonesia. (1992). *Undang-undang nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian*. Pemerintah Republik Indonesia.
- Republik Indonesia. (2025). *Instruksi presiden nomor 9 tahun 2025 tentang percepatan pembentukan koperasi desa/kelurahan Merah Putih*. Pemerintah Republik Indonesia.
- Tatasari, T., & Witara, K. (2025). *Pola pikir kewirausahaan: Strategi inovasi melampaui nalar*. PT Pena Cendekia Pustaka.
- Witara, K. (2025). Enhancing managerial decision-making through AI: Opportunities, challenges, and operational impact (systematic literature review). *Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Manajemen*, 4(2), 94–111. <https://doi.org/10.58192/ebismen.v4i2.3395>
- Witara, K. (2025). Webinar mewujudkan UMKM unggul melalui pendampingan berbasis ISO 9001: Sinergi dosen lintas ilmu dalam kegiatan PKM. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Nian Tana*, 3(3), 1–9. <https://doi.org/10.59603/jpmnt.v3i3.904>
- Witara, K., Nurdiansyah, et al. (2025). *Dasar-dasar manajemen perusahaan*. Get Press Indonesia.
- World Bank. (2020). *Small and medium enterprises (SMEs) finance: Improving access to finance for SMEs*. World Bank.